

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PADI DI KECAMATAN PALLANGGA, KABUPATEN GOWA, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Hendrawati Hamid

Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan
Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan
e-mail: hendrawatihamid59@gmail.com

ABSTRAK

Program pembangunan pertanian khususnya pemberdayaan petani yang dilaksanakan pada suatu daerah belumlah sepenuhnya memperhatikan potensi SDA dan SDM petani yang dimiliki. Untuk pengembangan SDM petani, hendaknya pemerintah daerah membuka ruang lebih lebar dalam melibatkan petani secara aktif dan sukarela, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil yang telah dicapai. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana Peran Pemerintah daerah dan apa faktor-faktor yang menghambat dalam pemberdayaan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dan faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan petani padi. Sampel penelitian sebanyak 10 orang ditetapkan secara *snowball sampling* (aparatur Dinas Pertanian, kab. Ka. BPP/KCD Kecamatan, PPL, dan petani). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program pemberdayaan petani yang dilaksanakan telah berjalan cukup baik meskipun belum optimal (produksi padi tahun 2013 6,5 ton/ha menjadi 7,58 ton/ha(2015). Kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pengadaan alsintan, program PUAP, dll. Faktor penghambatnya: kondisi jaringan irigasi belum memadai, ketersediaan benih padi dan pupuk masih sering mengalami keterlambatan, jumlah alsintan belum memadai, pembinaan manajemen kelompok belum optimal.

Kata kunci : Pemerintah Daerah dan pemberdayaan petani

PENDAHULUAN

Kebijakan utama yang diterapkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan pertanian adalah melalui program pemberdayaan petani dengan berbagai jenis kegiatan, yang telah dimulai sejak zaman orde baru sampai pada era reformasi saat ini. Hal ini tertera dalam berbagai kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Namun disadari bahwa pada umumnya, program pembangunan pertanian yang dilaksanakan di suatu daerah belumlah sepenuhnya memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi SDA maupun SDM khususnya para petani. Untuk pengembangan potensi SDM, pemerintah daerah hendaknya membuka ruang yang lebih lebar terhadap keterlibatan petani secara aktif dan sukarela, dalam keseluruhan proses kegiatan, mulai dari pengambilan keputusan pada proses perencanaan

(identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dll), pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan) serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu, potensi SDM petani seharusnya juga dikembangkan dengan baik dan terencana agar lebih berkualitas, melalui pendidikan (formal dan non formal), peningkatan keterampilan dan wawasannya, sehingga dapat berperan aktif sebagai subyek dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Memberikan peran kepada petani sebagai subyek dalam pengembangan potensi daerah, secara bertahap akan dapat menumbuhkan kemandiriannya dalam mengelola usaha tani. Dengan kata lain, mereka bisa lebih mandiri dalam berusaha (tidak selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah baru bekerja).

Di lain pihak, pemerintah pada semua tingkatan khususnya di tingkat terbawah dituntut untuk selalu memberikan pembinaan, agar pembangunan berjalan dengan baik dan berhasil, maka menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat, memberikan dorongan atau motivasi, sehingga senantiasa tumbuh kesadaran akan pentingnya untuk selalu ikut serta berperan/berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan pertanian yang merupakan potensi terbesar Indonesia sebagai negara agraris. Kebijakan pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Undang-undang ini menyebutkan bahwa petani perlu mendapat perlindungan secara optimal dalam menghadapi permasalahan atau kesulitan dalam : (1) memperoleh sarana dan prasarana produksi (saprodi), (2) kepastian usaha, (3) resiko harga, (4) kegagalan panen, (5) praktek ekonomi biaya tinggi, dan (6) perubahan iklim.

Selain itu, para petani juga perlu diberdayakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani yang lebih baik melalui : Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, penguatan kelembagaan petani khususnya kelompok tani. Demi terwujud dan terlaksananya Undang-Undang tersebut, maka pemerintah melakukan beberapa program dan kebijakan, antara lain melalui pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian. Pemberdayaan dalam bidang pertanian salah satunya adalah melalui pemberdayaan petani yang terhimpun dalam wadah kelompok tani. Pemberdayaan petani /kelompok tani dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, hubungan kerjasama yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka.

Pentingnya kelompok tani adalah sebagai pengantar antara masyarakat desa dengan masyarakat luar desa, karena :

1. Sebagai wadah membangun diri dan komunitasnya,
2. Sebagai wadah untuk proses belajar-mengajar,
3. Wadah menyelesaikan permasalahan,
4. Wadah mengelola inovasi, dan
5. Sebagai wadah menuju perubahan yang lebih baik.

Proses Pemberdayaan tersebut hanya dapat berjalan dengan baik dan berhasil jika masyarakat khususnya para petani ikut berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan, mulai dari awal dan berlanjut secara terus-menerus.

Kecamatan Pallangga, merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten Gowa, memiliki potensi SDA yang utama adalah bidang pertanian tanaman pangan, khususnya untuk komoditi padi dan disusul komoditi palawija (jagung, kacang hijau dll). Menurut Aswas (2014:131), pemberdayaan hendaknya didasarkan pada potensi wilayah (alam, sosial, budaya) di sekitar masyarakat. Jika daerah memiliki potensi alam atau sumber daya alam (SDA) yang baik untuk dikembangkan, maka kegiatan pemberdayaan seharusnya mengacu pada potensi tersebut. Begitu pula potensi lingkungan sosial dan budaya dapat dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dimiliki, menjadi awal yang baik untuk mendorong masyarakat aktif dalam pembangunan. Menggali potensi tersebut pada tahap ini, perlu mempertimbangkan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Melalui cara ini, pemberdayaan akan lebih mudah dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat. Di sisi lain budaya dan kearifan lokal akan tetap lestari.

Strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat, memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat, dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat, pada intinya memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka berkembang pendekatan yang berpusat pada rakyat. Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sebenarnya merupakan antitesis dari model pembangunan yang berorientasi pada produksi.

Secara teoritis pemerintah pusat merumuskan kebijakan pertanian yang terkait dengan isu-isu strategis pertanian yang lebih bersifat nasional dan internasional, serta menyentuh sebagian besar kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat setidaknya harus fokus pada masalah-masalah seperti :

1. meningkatkan ketahanan pangan nasional,
2. meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian,
3. pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, serta
4. meningkatkan kesejahteraan petani secara umum.

Sementara peran pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, adalah menangkap potensi pertanian daerah untuk bisa dikembangkan dalam kerangka kebijakan yang masih selini dengan pusat. Artinya, pemerintah daerah dalam mengembangkan keunggulan lokal pertaniannya tidak boleh abai terhadap hal-hal yang menjadi fokus pemerintah pusat. Misalnya, dalam mengembangkan komoditas lokal harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maupun memaknai ketahanan pangan dengan mengembangkan produk makanan pokok yang mudah ditanam dan biasa

dikonsumsi oleh masyarakat setempat, dalam arti kata tidak harus selalu mengkonsumsi nasi yang berasal dari komoditi padi.

Swift dan Levin (1987); dalam Mardikanto dan Poerwoko (2012) telah merangkum pengertian pemberdayaan secara luas antara lain pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk :

1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial

Karena itu, World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Sejalan dengan itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, memperngaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya. Dalam pengertian ini, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, antara lain dalam arti :

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
2. Perbaikan kesejahteraan soaial (pendidikan dan kesehatan);
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan;
4. Terjaminnya keamanan;
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Pemberdayaan yang mendudukan masyarakat sebagai subyek pembangunan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga ketika intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktifitas pembangunan masyarakat, partisipai yang muncul dari masyarakat merupakan partisipasi yang utuh dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena berkaitan dan menyentuh kepentingan mereka sendiri. Dalam bahasa yang lebih populer posisi masyarakat sebagai subyek kemudian akan melahirkan pendekatan yang *bottom up* sifatnya.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya (Widjajanti, 2011).

Secara demografis, karakteristik masyarakat pedesaan terletak pada dominasi lapangan pekerjaan yang berada di sektor pertanian. Seperti yang telah diungkapkan, bahwa pemberdayaan bermuara pada upaya seluruh pihak untuk menjadikan masyarakat keluar dari kemiskinan maka pembicaraan tentang kesejahteraan dengan titik tekan pada pendapatan masyarakat menjadi hal utama. Oleh sebab itu menelaah pendapatan masyarakat pedesaan dipandang cukup relevan untuk digunakan sebagai pintu masuk upaya pemberdayaan masyarakat (Garner and Ana Paula, 2014).

Dalam konsep pendapatan pertanian atau *income farm* masyarakat dikelompokkan menurut sumber penghasilan mereka. Pengelompokan ini terbagi atas tiga yakni *on farm*, *off farm*, dan *non farm*. ***On farm*** adalah mereka yang memperoleh penghasilan dari sektor pertanian. Mereka ini adalah petani, buruh tani, atau pemilik perkebunan besar yang mengandalkan penghasilannya dari usaha perkebunan tersebut. ***off farm*** mengacu pada penghasilan yang diperoleh dari usaha non budidaya pertanian tetapi masih berada dalam sektor pertanian. *Off farm* banyak digeluti oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan atau ketika mereka berada pada situasi yang kerap disebut sebagai *gestation period* (masa antara satu panen dengan panen yang lain). Masa ini ditandai dengan tidak adanya aktifitas usaha tani karena pergantian musim atau karena tanaman belum panen). *Off farm* seperti yang dikatakan oleh Mc Namara and Christoph (2001) merupakan strategi petani dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Strategi ini dititikberatkan pada kontinuitas aliran penghasilan yang terjamin dan juga mengurangi resiko kegagalan panen. Salah satu contoh *off farm* adalah seorang petani saat menunggu hasil panen membuka jasa penggilingan jagung. Penghasilan dari usaha penggilingan jagung ini dikategorikan dalam kegiatan *off farm*. ***Non farm*** merujuk pada kegiatan ekonomi di daerah pedesaan tetapi tidak berkaitan dengan sektor pertanian. Industri rumahan yang berbasis masyarakat desa merupakan contoh tentang kegiatan dalam kategori ini (Fabella, Raul V., 1985). Pembuatan batako, pekerja dalam pembukaan lahan pertanian, karyawan industri makanan olahan adalah *non farm*. Kebanyakan tukang becak yang bekerja di perkotaan adalah juga petani yang sedang menunggu masa panen. Mereka berada dalam masa *gestation period* dan berduyunduyun ke kota untuk memperoleh pekerjaan. Pekerja ini tidak tinggal di kota melainkan akan selalu kembali kerumah mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan di perkotaan jelas adalah *non farm* tetapi mereka sendiri masih tetap tinggal di pedesaan.

Pembicaraan tentang sumber *income* masyarakat pedesaan ini sangat penting ditelaah untuk memudahkan berbagai kalangan, terutama pemerintah daerah dalam melakukan intervensi agar kegiatan pemberdayaan dapat terlaksana dengan tepat sasaran. Melalui pengenalan yang tepat pada berbagai kegiatan dalam pengelompokan berdasarkan *income*, maka kajian ini dapat menyusun rekomendasi untuk ditindalajuti demi pencapaian derajat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Salah satu hal yang terpenting juga adalah melalui pengenalan kegiatan *non farm*, *off farm*, dan *on farm* agar kegiatan ekonomi desa akan semakin dinamis dan sekaligus menjadikan desa sebagai tumpuan ekonomi berbasis masyarakat. Dengan demikian kajian ini juga memiliki dampak lain, yakni dengan semakin kuatnya basis ekonomi desa tumpahan pekerja ke kota dapat dihindari.

Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika), agar masyarakat menjadi lebih berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah

suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai *power* dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri.

Secara **konseptual**, pemberdayaan harus mencakup **enam hal** berikut ini:

1. *Learning by doing* : artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus-menerus, dan dampaknya dapat terlihat
2. *Problem solving* : artinya, pemberdayaan harus dapat memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
3. *Self evaluation* : artinya, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self development and coordination* : artinya, mendorong masyarakat agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
5. *Self selection* : artinya, suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah kedepan.
6. *Self decisim* : artinya, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (Saraswati, dalam Alfitri, 2011:23-24).

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat, dan apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi proses menggelinding dengan sendirinya.

Hikmat (2010:43-44) mengemukakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu :

1. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley dan Marsden, 1984). Proses ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi, agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses ini disebut sebagai kecenderungan sekunder.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode eksploratif dan pendekatan induktif. Sifat dari penelitian eksploratif adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi. John W. Creswell dalam *Research Design* (2013:4) mengatakan bahwa, penelitian eksploratif dengan pendekatan induktif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menggali atau memperdalam permasalahan tertentu dan berangkat dari berbagai fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Melalui

metode eksploratif dengan pendekatan induktif, dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan mencakup dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan keterlibatannya observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Observasi Partisipan (*Participant Observation*) dan Observasi Non Partisipan (*Non Participant Observation*). Penelitian yang dilakukan, menggunakan teknik Observasi Non Partisipan. Observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan petani di Kecamatan Pallangga. Sedangkan wawancara dilakukan secara terstruktur sesuai dengan pedoman yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan terhadap informal ditentukan secara *snowball* sampling sesuai arahan pejabat PLT Kepala Dinas Pertanian, yaitu pihak yang terkait langsung di lapangan yaitu: Aparat Dinas Pertanian terkait (pejabat Eselon 3 dan 4) , Kepala KCD/BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) kecamatan, Kepala Desa setempat, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pengurus kelompok tani, dan Petani, sebanyak 10 orang.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2014:244) menyatakan bahwa “*Analysys in the procces of systematically searching and arranging the interview transcript, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*”. Artinya analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilapangan menurut Miles *and* Huberman dalam Siregar (2010:213) mengungkapkan bahwa “Ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Pallangga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2005, dengan ibukota kecamatan adalah Mangalli. Data Kecamatan Pallangga dalam angka tahun 2014, memiliki jumlah penduduk sebanyak 104.523 jiwa. Jumlah penduduk merupakan potensi yang dimiliki suatu wilayah dalam percepatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh kemampuan dan usaha penduduk dalam membangun wilayahnya serta program pemerintah yang senantiasa berpihak pada kebutuhan rakyatnya. Penduduk dalam kehidupannya harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam segala bidang kehidupan, oleh karena itu keluarga yang merupakan bagian integral dari suatu wilayah, dimana penduduk secara langsung terlibat dan memiliki peran penting dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan memberi peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang merupakan sifat dinamik dari masyarakat modern.

Dari aspek perekonomian yang terlihat pada tingkat kesejahteraan masyarakat/keluarga nampaknya sangat bervariasi, hal ini disebabkan adanya perbedaan pada mata pencaharian kepala keluarga, dan sebagian besar keluarga di kecamatan Pallangga masih tergolong keluarga prasejahtera atau masuk dalam kategori keluarga miskin, dengan jumlah 4.392 KK, keluarga sejahtera satu sebesar 4.938, keluarga sejahtera dua sebesar 9.331 KK, keluarga sejahtera tiga sebesar 3.705 KK , dan keluarga

sejahtera tiga plus hanya 937 KK, dari jumlah KK secara keseluruhan sebesar 23,303 KK. Mata pencaharian keluarga prasejahtera tersebut adalah sebagai buruh tani, tukang becak, pedagang keliling (penjual sayur, dll), pedagang kaki lima, menjual di pasar-pasar tradisional. Dengan demikian, keluarga prasejahtera, sejahtera satu dan sejahtera dua inilah yang menjadi sasaran utama untuk diberdayakan agar bisa hidup lebih sejahtera demi mewujudkan pembangunan dan kehidupan yang berkeadilan sesuai dengan amanat Panca Sila dan UUD 1945.

Kecamatan Pallangga memiliki potensi lahan pertanian yang cukup besar untuk pengembangan komoditi tanaman pangan khususnya padi dan palawija dengan total luas lahan garapan sebesar 3.573,2 Ha. Adapun luas lahan garapan tersebut tersebar pada 16 desa/kelurahan dengan perincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.

Luas Lahan Garapan, Komoditi Unggulan dan Jumlah Kelompok Tani

No	Desa/Kelurahan	Sawah (Ha)	Lahan Kering (Ha)	Komoditi Unggulan	Jumlah Klp. Tani
1	2	3	4	5	6
1	Je'netallasa	95.13	0,00	Padi, palawija	14
2	Tetebatu	136.44	0.00	Sda	15
3	Pallanga	282.65	58.69	Sda	19
4	Bungaejaya	176.42	45.49	Sda	9
5	Pa'nakukang	208.98	20.72	Sda	22
6	Julukanaya	196.83	41.15	Sda	16
7	Julubori	288.80	43.29	Sda	27
8	Julupa'mai	237.27	80.13	Sda	20
9	Bontoramba	258.35	183.55	Sda	31
10	Kampili	182.79	250.51	Sda	35
11	Toddo'toa	138.11	41.45	Sda	11
12	Parangbanoa	162.14	127.72	Sda	14
13	Pangkabinanga	94.44	0.00	Sda	5
14	Bontoala	50.00	0.00	Sda	6
15	Mangalli	162.65	1.50	Sda	12
16	Taeng	75.00	1.00	Sda	12
	Jumlah	2.678.00	895.20		267

Sumber : Data PPL Kecamatan Pallangga, 2014

Adapun jumlah anggota/petani setiap kelompok tani sebanyak 25 orang. Sebagai kecamatan yang mempunyai potensi pertanian cukup besar, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan pertanian, khususnya dalam memberdayakan petani/kelompok tani agar dapat mengelola sumber daya yang ada, pemerintah kabupaten Gowa mendirikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pallangga. BPP merupakan unit pelaksana teknis (UPT) penyuluhan Badan /Dinas/Kantor atau

kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan. Balai Penyuluhan Pertanian memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian, serta sekaligus merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K).

Penyuluhan sebagai ujung tombak dalam memberdayakan petani, menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Sebagai penjabaran dari UU Nomor 16/2006, Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan dengan menjadikan BPK/BP3K (Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan), sebagai pusat koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan yang berbasis kawasan komoditi unggulan dan atau wilayah. Selain itu, BPK/BP3K merupakan pusat data dan informasi bagi petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan usaha di wilayah kecamatan.

Berbagai program atau kegiatan pemberdayaan petani yang telah dijalankan oleh BPP, meliputi penguatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk pertemuan kelompok tani yang dihadiri oleh para penyuluh, KTNA, aparat desa, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan pemberdayaan petani dilaksanakan sejalan dengan program pemerintah maupun secara swadaya, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para petani agar mau dan mampu mengadopsi suatu teknologi baru yang dapat meningkatkan usaha taninya sesuai dengan program tahun berjalan.

Secara terperinci program dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sekolah lapang pengelalooan tanaman padi (SL-PTT) padi sawah pada kawasan pemantapan dan pengembangan
2. Pengadaan alat dan mesin pertanian, seperti mesin penggilingan padi, hand traktor, dan pompa air
3. Program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)
4. Pengembangan optimasi lahan
5. Peningkatan produksi melalui budidaya padi pola *system rice of intensification* (SRI)
6. Peningkatan produksi melalui budidaya padi pola IPAT berbasis organik
7. Pemberdayaan petani penangkar dengan bantuan benih pokok
8. Pembangunan dan perbaikan beberapa jaringan irigasi tingkat usaha tani
9. Perbaikan administrasi kelompok tani.
10. Pembuatan jalan usaha tani

Kegiatan/program tersebut diatas mendapatkan dukungan dana dari baik APBN, APBD, kerjasama pihak ketiga (BUMN dan swasta), serta swadaya masyarakat.

Selain kegiatan dan program diatas, BPP sebagai unit pelaksana teknis dibawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, juga melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak/instansi, baik pemerintah maupun swasta. Kemitraan ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja kelompok tani/ wilayah binaan dalam hal terdiseminasinya teknologi pertanian, maupun terjalinnnya para pelaku utama dan pelaku usaha dalam sistem kerja sama yang saling menguntungkan. Bentuk kemitraan yan berlangsung di BPP Pallangga meliputi transfer teknologi maupun aspek pasar. Walaupun belum

mampu mengkomodir semua kelompok tani, diharapkan pada masa yang akan datang kegiatan kemitraan ini dapat lebih dikembangkan.

Beberapa kegiatan kemitraan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Transfer teknologi budidaya padi sistem legowo 2 : 1 dari BPTP Sulawesi Selatan
2. Transfer teknologi budidaya ubi jalar sesuai standar kualitas yang ditentukan
3. Transfer teknologi budidaya kacang hijau dari Balai Penelitian Kacang-kacangan Kementerian Pertanian
4. Sosialisasi penggunaan pupuk organik cair dari beberapa perusahaan swasta
5. Pengadaan materi penyuluhan pertanian dari Litbang Pertanian
6. Kerjasama dengan BPS dalam pengambilan ubinan.

Kegiatan kemitraan sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan petani, karena tidak akan mungkin pemerintah daerah dapat menanggung semuanya, kemitraan yang dimaksud tidak hanya yang bersifat fisik/materi, seperti pemberian bantuan sarana produksi kepada petani/kelompok tani, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan pemberdayaan yang bersifat non fisik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Kegiatan non fisik tersebut antara lain dalam bentuk demonstrasi (cara dan hasil, dll), pelatihan, sekolah lapangan, magang, studi banding, dan lain-lain.

Pemberdayaan petani dari aspek permodalan masih merupakan salah satu kendala dalam kegiatan usaha tani. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serta mengelola dana PUAP di Gapoktan dan adanya bantuan sosial dari pemerintah. Sedangkan akses permodalan ke lembaga keuangan atau perbankan, saat ini masih terbatas hanya dilakukan secara perorangan/anggota kelompok tani, hal ini terkait dengan adanya persyaratan agunan.

Disisi lain sumbangan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja masih sangat besar hingga sekarang, sehingga pembangunan pertanian merupakan salah satu kunci yang akan menentukan kestabilan perekonomian ke depan, khususnya terkait dengan masalah pengangguran. Selain itu, pembangunan sektor pertanian memiliki makna yang lebih dalam, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi pelaku ekonomi yang saat ini masih berkubang dalam kemiskinan, yaitu petani. Dengan demikian, kemajuan yang diperoleh dari sektor pertanian secara otomatis akan paralel dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dari aspek birokrasi, pembangunan pertanian merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun demikian, efektivitas pencapaian pembangunan akan lebih terarah apabila terdapat fokus yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara teoritis pemerintah pusat merumuskan kebijakan pertanian yang terkait dengan isu-isu strategis pertanian yang lebih bersifat nasional dan internasional, serta menyentuh sebagian besar kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat setidaknya harus fokus pada masalah-masalah seperti :

1. meningkatkan ketahanan pangan nasional,
2. meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian,
3. pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, serta
4. meningkatkan kesejahteraan petani secara umum.

Sementara peran pemerintah daerah lebih pada menangkap potensi pertanian daerah untuk bisa dikembangkan dalam kerangka kebijakan yang masih selini dengan

pusat. Artinya, pemerintah daerah dalam mengembangkan keunggulan lokal pertaniannya tidak boleh abai terhadap hal-hal yang menjadi fokus pemerintah pusat. Misalnya, dalam mengembangkan komoditas lokal harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maupun memaknai ketahanan pangan dengan mengembangkan produk makanan pokok yang mudah ditanam dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat, dalam arti kata tidak harus selalu mengkonsumsi nasi yang berasal dari komoditi padi.

Kebijakan utama yang diterapkan pemerintah untuk memajukan pembangunan pertanian adalah melalui program pemberdayaan petani melalui berbagai jenis kegiatan, yang telah dimulai sejak zaman orde baru sampai pada era reformasi saat ini. Hal ini tertera dalam berbagai kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Sejalan dengan peraturan yang ada, maka pemerintah kabupaten Gowa melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah memprogramkan berbagai kegiatan pemberdayaan petani di kecamatan Pallangga yang secara operasional dijalankan oleh BPP kecamatan Pallangga, mulai yang dianggarkan melalui APBD, APBN, kerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN, swasta serta swadaya.

Melalui wawancara yang dilakukan baik tokoh tani/pengurus kelompok tani dan Gapoktan maupun anggota kelompok tani, serta 3 (tiga) orang penyuluh pertanian yang bertugas pada 2 (dua) desa yaitu Panakkukang dan Kampili. Sebagian besar responden telah merasakan hasil dan manfaat program/kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan di desa mereka, baik yang bersifat fisik (bantuan alsintan, benih unggul, pupuk, pestisida dll) serta kegiatan non fisik seperti kegiatan-kegiatan penyuluhan dalam berbagai metode (sekolah lapangan, sosialisasi, demonstrasi teknologi baru, bantuan modal usaha tani melalui Gapoktan, dll). Selain itu, upaya pemberdayaan petani juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Gowa melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Pembinaan Pupuk dan Pestisida (Ichsan, SP, MP) Dinas Pertanian kabupaten mengungkapkan bahwa, proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani yang selama ini dilaksanakan, secara berurutan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program
2. Sosialisasi
3. Perencanaan : melibatkan pemerintah daerah, perwakilan petani/kelompok tani dan pemerintah desa. Pada proses perencanaan untuk pelaksanaan suatu kegiatan diawali dengan musyawarah yang melibatkan semua *stake holder*, untuk mengadakan survei, identifikasi, investigasi dalam rangka untuk menentukan arah dan kebijakan kegiatan
4. Implementasi

Sosialisasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, karena momen ini justru merupakan suatu hal yang sangat berharga, dan menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan/program pemberdayaan. Melalui kegiatan sosialisasi, para agen maupun aparat yang bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan, dapat mengkomunikasikan dan mengetahui secara jelas, langsung dari masyarakat calon penerima manfaat, tentang berbagai hal penting yang

dibutuhkan, sekaligus memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang program/kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti :

1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat
2. Kebutuhan utama masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya
3. Materi apa yang akan menjadi pokok pembahasan
4. Metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyampaikan materi agar dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dijalankan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.
5. Waktu yang terbaik untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan (penyuluhan, pelatihan/kursus, demonstrasi/praktek dll)
6. Bentuk partisipasi atau dukungan yang diharapkan dari masyarakat
7. Bentuk dan partisipasi yang diharapkan dari para pemangku kepentingan (tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, mitra usaha dll)
8. Fasilitas/bantuan-bantuan apa saja yang disiapkan oleh pelaksana/ pemerintah.

Kegiatan sosialisasi sebaiknya dilaksanakan lebih dari satu kali, karena proses ini merupakan tahapan pengenalan, serta mengingat tingkat penerimaan masyarakat akan hal-hal yang baru bukanlah sesuatu yang instan, mereka membutuhkan waktu dan pembuktian yang cukup untuk dapat menerima, dan memberikan respon yang positif terhadap suatu kegiatan. Hal ini disebabkan, karena kegiatan pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu yang cukup panjang (bisa sampai beberapa tahun). Faktor lain yang menyebabkan, kegiatan sosialisasi tidak cukup jika hanya dilaksanakan satu kali saja, adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat, karena hal ini sangat menentukan tingkat pemahaman dan penyerapan suatu informasi.

Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat, betul-betul harus dijalankan secara terpadu, antara fasilitator beserta seluruh *stakeholder* (termasuk masyarakat penerima manfaat), karena tahapan ini merupakan hal yang sangat penting yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan ini akan diketahui masalah-masalah sesungguhnya yang secara nyata dihadapi oleh masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, seluruh hasil kesepakatan hendaknya dibuat secara tertulis sehingga akan menjadi acuan dalam bekerja, serta menghindari terjadinya saling menyalahkan ketika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Prinsip dasar dan paling utama, yang harus selalu diingat dan diimplementasikan oleh para fasilitator, dalam penyusunan suatu perencanaan program pemberdayaan masyarakat, adalah harus bersifat partisipatif (*bottom up*).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala BPP sekaligus sebagai KCD dan PPL, mengungkapkan bahwa, implementasi kegiatan pemberdayaan petani dilapangan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian ditindaklanjuti dengan penetapan berbagai hal seperti : Penetapan materi, Penetapan Metode, Penetapan waktu dan tempat, dan Pihak-pihak yang terlibat. Melalui proses tersebut, kegiatan pemberdayaan petani yang dilaksanakan selama ini berdasarkan pada kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani, seperti untuk materi adalah tentang penggunaan

benih unggul padi, teknologi pemupukan berimbang, pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati, dengan metode ceramah, diskusi dan demonstrasi, yang dilaksanakan di lahan milik petani. Dalam pelaksanaan kegiatan ini turut terlibat Kepala Desa, Penyuluh dan petani/kelompok tani. Selanjutnya diungkapkan bahwa, selain kegiatan-kegiatan tersebut para penyuluh pertanian juga senantiasa melakukan kunjungan setiap minggu ke setiap kelompok tani secara bergiliran, sebagai upaya untuk melakukan penyuluhan/pembinaan secara rutin dan melakukan pendampingan kepada petani dalam penerapan teknologi sesuai yang telah dianjurkan.

Dalam penetapan materi yang akan diberikan pada setiap kegiatan/program pemberdayaan hendaknya selalu menyesuaikan dengan beberapa hal, seperti : (1) kebutuhan utama masyarakat sasaran, (2) permasalahan yang dihadapi, (3) potensi masyarakat sasaran (SDM) terutama terkait pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, (4) potensi wilayah kegiatan (SDA, Sumber Daya Buatan/SDB), (5) kondisi sosial dan budaya masyarakat (tingkat pendidikan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam berusaha, dan menjalani kehidupannya), (6) kondisi ekonomi (sumber utama mata pencaharian, tingkat kesejahteraan dan lain-lain), (7) kebijakan pemerintah setempat, khususnya yang terkait dengan kepedulian terhadap masyarakat miskin, (8) keterlibatan para pemangku kepentingan (tokoh masyarakat, *stake holder* dll)

Penetapan materi tentunya telah disepakati sejak tahap persiapan/sosialisasi dan identifikasi masalah yang dilakukan secara partisipatif. Penentuan/ penetapan materi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat harus betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai sasaran kegiatan, tetapi dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya terkait dengan ketersediaan potensi SDA, tetapi juga SDM, serta hal-hal yang sering dilakukan masyarakat, atau kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha dan aktivitas kehidupan lainnya, karena faktor-faktor inilah yang akan menjadi acuan bagi tim fasilitator/pendamping dalam memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap fasilitator seharusnya telah memahami kedelapan faktor tersebut diatas, serta faktor-faktor lainnya sebelum suatu program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai, sehingga mereka dapat melakukan pemetaan dengan baik tentang segala potensi yang ada pada suatu wilayah, mulai dari kekuatan, peluang, tantangan dan kelemahan yang ada.

Selain hal tersebut, dalam pemilihan dan penetapan metode hendaknya juga memperhatikan beberapa hal yang sangat erat kaitannya, antara lain :

1. Materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat
2. Penetapan waktu pelaksanaan kegiatan atau penyuluhan serta lamanya pelaksanaan hendaknya ditentukan oleh masyarakat, karena merekalah yang paling mengetahui diwaktu mana dapat meninggalkan pekerjaan rutinitas, hal ini untuk menghindari adanya rasa keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan
3. Lebih banyak menggunakan bahan dan alat untuk mempraktekkan materi yang diberikan
4. Memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat untuk langsung melakukan praktek, berdialog, jadi fasilitator cukup menunjukkan cara kerja.

5. Fasilitator tidak memberikan kesan terburu-buru atau ingin cepat selesai ketika menyampaikan materi.

Kenyataan dilapangan, mengapa tidak sedikit program pemberdayaan yang kurang berhasil, atau dengan kata lain tidak terjadinya *sustainabel* (keberlanjutan) kegiatan, sehingga kemandirian masyarakat sebagai tujuan akhir, setelah selesainya suatu program pemberdayaan dilaksanakan, tidak dapat terwujud. Hal tersebut umumnya terjadi karena, para pendamping tidak/kurang menjalankan fungsinya sebagai seorang fasilitator, mereka lebih sering menentukan secara sepihak, atau lebih banyak menentukan sendiri kelima hal tersebut diatas, termasuk penetapan metode pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Menghadapi masyarakat yang kurang berdaya, memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa bagi seorang agen pemberdayaan, terutama bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik, karena karakter masyarakat biasanya lebih tertutup dan bahkan sering merasa curiga kepada orang baru yang berasal dari luar wilayah mereka. Oleh karena itu, harus diusahakan agar sebagian besar tim fasilitator berasal dari wilayah setempat atau telah dikenal oleh penerima manfaat, kecuali jika memang ada masalah yang sangat urgen, sehingga membutuhkan tenaga ahli/orang baru. Selain itu, dibutuhkan adanya keterlibatan langsung tokoh-tokoh masyarakat setempat, untuk membantu dalam pelaksanaan program, mulai dari sosialisasi dan identifikasi permasalahan. Untuk kecamatan Pallangga seluruh petugas lapangan merupakan penduduk setempat, sehingga lebih mudah membaaur baik dari aspek bahasa maupun perilaku.

Wawancara juga dilakukan peneliti terhadap petani (ketua/pengurus dan anggota kelompok tani) sebagai sasaran utama program/kegiatan pemberdayaan petani. Secara garis besarnya para petani dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh para penyuluh, yang bertindak sebagai fasilitator/pendamping karena baik materi, metode maupun lokasi dan tempat pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan oleh para petani, tetapi keterlibatan petani biasa diharapkan lebih ditingkatkan. Untuk kegiatan fisik di lapangan seperti kerjasama/gotong royong kegiatan usaha tani masih perlu lebih ditingkatkan

Faktor – Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Petani

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani padi di kecamatan Pallangga, melalui berbagai program dan kegiatan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil terhadap terjadinya peningkatan produksi padi dalam dua tahun terakhir, namun jika melihat potensi yang dimiliki kecamatan Pallangga terutama sumber daya lahan dan air, sebenarnya potensi kenaikan produksi masih bisa lebih ditingkatkan seperti beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan yang menjadi pusat produksi padi, misalnya kabupaten Sidrap. Hal ini belum dapat diwujudkan di kabupaten Gowa khususnya di kecamatan Pallangga berhubung masih adanya beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para petani, terkait dengan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya tersebut, yaitu :

1. Kondisi jaringan irigasi yang belum memadai untuk mengairi seluruh sawah yang ada, sementara sumber air cukup tersedia, sehingga sawah-sawah petani mengalami keterlambatan ketersediaan air dan bahkan kekurangan air.
2. Ketersediaan sarana produksi pertanian khususnya benih padi unggul/bermutu dan pupuk masih sering mengalami keterlambatan dan jumlahnya tidak cukup.
3. Jumlah/ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) khususnya *handtraktor* dan pompa air belum seimbang dengan luas areal persawahan, menyebabkan pengolahan lahan sering terlambat yang berdampak pada terjadinya keterlambatan waktu tanam, sehingga tidak sesuai lagi dengan hasil ketetapan pada acara *appalili* (rencana turun sawah).

Kondisi tersebut merupakan permasalahan utama yang dialami oleh para petani, dan petani baik pengurus kelompok maupun anggota kelompok. permasalahan ini, menimbulkan berbagai permasalahan lain utamanya pada tingkat/hasil produksi padi petani baik dari aspek kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya. Persoalan lainnya secara teknis, petani tidak seluruhnya dapat menanam tepat waktu/terlambat menanam karena kurang tersedianya air, benih unggul dan pupuk, ditambah lagi dengan jumlahnya yang tidak mencukupi, sehingga penerapan teknologi yang telah dianjurkan oleh para penyuluh/fasilitator tidak dapat diterapkan. Dampak dari kejadian tersebut adalah dapat menyebabkan terjadinya serangan hama dan penyakit, sehingga otomatis akan berdampak pada tingkat produksi padi.

Selain kendala dan permasalahan tersebut, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para petani/kelompok tani yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan para fasilitator/penyuluh pertanian, yang terungkap pada saat wawancara dengan petani, yaitu :

1. Timbulnya hama wereng, tikus dan keong mas
2. Pemberian bantuan pemerintah yang dirasakan belum merata pada semua kelompok tani
3. Ketersediaan pestisida masih belum optimal.
4. Sekolah lapangan belum menjangkau seluruh petani.
5. Harga gabah petani masih biasa dipermainkan oleh pihak pedagang
6. Belum adanya koperasi yang dapat menyiapkan saprodi dan membeli hasil/produksi petani.

Simpulan

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi untuk pemberdayaan petani padi yang secara operasional dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian lapangan (PPL), telah berjalan cukup baik yg ditandai dengan terjadinya peningkatan produksi padi sawah dalam 2 (dua) thn terakhir yaitu sebesar 16,6 % (dari tahun 2013 – 2015), hal ini dapat terwujud melalui berbagai kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan seperti :

- a. Sekolah lapang pengelolaan tanaman padi (SL-PTT) padi sawah pada kawasan pemantapan dan pengembangan
- b. Pengadaan alat dan mesin pertanian, seperti mesin penggilingan padi, hand traktor, dan pompa air
- c. Program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)
- d. Pengembangan optimasi lahan

- e. Peningkatan produksi melalui budidaya padi pola *system rice of intensification* (SRI)
- f. Peningkatan produksi melalui budidaya padi pola IPAT berbasis organik
- g. Pemberdayaan petani penangkar dengan bantuan benih pokok
- h. Pembangunan dan perbaikan beberapa jaringan irigasi tingkat usaha tani
- i. Perbaikan administrasi kelompok tani.
- j. Pembuatan jalan usaha tani

Kegiatan/program tersebut diatas mendapatkan dukungan dana dari baik APBN, APBD, kerjasama pihak ketiga (BUMN dan swasta), serta swadaya masyarakat. Sebenarnya tingkat produksi padi petani (kuantitas dan kualitas) tersebut secara teknis dan non teknis masih dapat lebih ditingkatkan jika beberapa faktor penghambat (kendala dan masalah) dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, seperti :

- a. Kondisi jaringan irigasi yang belum memadai untuk mengairi seluruh sawah yang ada, sementara sumber air cukup tersedia.
- b. Ketersediaan sarana produksi pertanian khususnya benih padi unggul/bermutu dan pupuk masih sering mengalami keterlambatan dan jumlahnya belum mencukupi.
- c. Jumlah/ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) khususnya *handtraktor* dan pompa air belum seimbang dengan luas areal persawahan, menyebabkan pengolahan lahan sering terlambat.

Saran

Dari hasil wawancara dengan informan dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sesuai pengalaman dan kemampuan penulis miliki, sebagai bahan masukan dan evaluasi maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Diharapkan kiranya Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan sinergitas setiap SKPD yang terkait langsung, khususnya antara Dinas Pertanian, Dinas PSDA dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta setiap SKPD dapat lebih proaktif melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pengadaan Sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh petani dalam menjalankan usaha taninya.
- b. Diharapkan untuk melatih petani maju menjadi petani penangkar benih, sebagai upaya mengatasi masalah kebutuhan dan keterlambatan ketersediaan benih unggul padi.
- c. Agar pengadaan alat dan mesin pertanian khususnya *handtraktor* dan pompa air dapat didistribusikan secara lebih merata pada kelompok-kelompok tani.
- d. Upaya pemberdayaan petani hendaknya tidak hanya difokuskan pada faktor teknis, tetapi juga pada aspek manajemen kelompok tani khususnya yang terkait dengan kepemimpinan, kerjasama kelompok (mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemasaran hasil dll), dan administrasi kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri, 2011. *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Anwas, O.M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Alfabeta. Bandung.

- Elizabeth, G and Ana Paula de la O Campos. 2014. *Identifying the “family farm” : an informal discussion of the concepts and definitions*. ESA Working Paper No. 14-10. Rome, FAO.
- Fabella, Raul V. 1985. *Rural Industry and Modernization*. In Mukhopadhyay Swapna and Chee Ping Lim (eds). *The Rural Non-Farm Sector in Asia*. Asian and Pacific Development Centre.
- Hikmat, H. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora. Bandung.
- Mardikanto T dan Poerwoko S. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- McNamara, Kevin and Christoph Weiss, 2001. *On- and Off-Farm Diversification*. Paper to be presented at the 2001 AAEEA-CAES Meeting in Chicago.
- Siregar, S, 2010. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Wijayanti, 2011. Model pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.15-27*.
- World Bank, 2001. Bulletin Vol. 11 No. 4/Vol 2 No. 1. October-December 2001. Yogyakarta.
- Yustika, A.E. 2009. *Pengurangan Kemiskinan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan*. LIPI. Jakarta

Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Kecamatan Pallangga Dalam Angka, Tahun 2014
- Profil Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pallangga, Tahun 2014